

## **Pesan-pesan Anti Korupsi dalam Berita *Republika.co.id* untuk Meningkatkan Peran Media Islam**

**Nadhiroh**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAIMAS Wonogiri  
[nadhiroh@staimaswonogiri.ac.id](mailto:nadhiroh@staimaswonogiri.ac.id)

**Mirza Azkia Muhammad Adiba**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAIMAS Wonogiri  
[mirzaazkia07@gmail.com](mailto:mirzaazkia07@gmail.com)

**Tutut Nur Trias Wijayanti**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAIMAS Wonogiri  
[Thututtrias@gmail.com](mailto:Thututtrias@gmail.com)

**Achmad Zaky Faiz**

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAIMAS Wonogiri  
[achmadzakyfaiz@staimaswonogiri.ac.id](mailto:achmadzakyfaiz@staimaswonogiri.ac.id)

**Ruslina Dwi Wahyuni**

Prodi Hukum Tata Negara, STAIMAS Wonogiri  
[roselyna555@gmail.com](mailto:roselyna555@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Artikel ini berupaya mengeksplor pesan-pesan anti korupsi dalam berita *Republika.co.id* untuk meningkatkan peran media Islam. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, media massa, khususnya media Islam, memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan etika yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pesan-pesan anti korupsi yang disampaikan dalam berita *Republika.co.id*, sebuah portal berita yang berbasis pada perspektif Islam. Novelty pada kajian ini adalah lebih menekankan kepada studi tentang pesan-pesan anti korupsi. Penelitian dibatasi pada konten berita. Riset ini menggunakan metode studi pustaka. Analisis dilakukan dengan model Robert Entman. Artikel ini mengkaji bagaimana *Republika.co.id* menyajikan berita dengan pesan-pesan anti korupsi dalam rangka meningkatkan peran sebagai media Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Republika.co.id* secara konsisten mengangkat pesan-pesan moral dan spiritual yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. *Republika.co.id* telah menunjukkan peranannya sebagai agen perubahan yang dalam membentuk kesadaran moral publik terhadap pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui pemberitaan yang konsisten dan berbasis nilai Islam, media Islam ini dapat memperkuat budaya integritas di Indonesia,

sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi. Oleh karena itu, media Islam seperti *Republika.co.id* memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memanfaatkan nilai-nilai agama sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

**Kata Kunci :** pesan, berita, korupsi, media Islam

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yang merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan pembangunan. Dalam menghadapi persoalan ini, media massa memiliki peran yang sangat penting, baik dalam memberikan informasi yang akurat maupun dalam memengaruhi pola pikir masyarakat untuk menghindari tindakan korupsi. Media Islam, yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyampaikan pesan-pesan moral yang berorientasi pada pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang menghambat kemajuan dan kestabilan suatu negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya merusak perekonomian, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, memperlebar jurang kesenjangan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi prioritas bagi pemerintah dan berbagai lembaga antikorupsi, namun tantangan dalam memberantas perilaku ini masih sangat besar. Salah satu faktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah perubahan paradigma sosial, yang memerlukan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media massa.

Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai agen kontrol sosial yang dapat memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial. Media massa memiliki kemampuan untuk mengedukasi, mengingatkan, dan membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, media memiliki potensi yang besar dalam mendukung pemberantasan korupsi.

Dalimunthe dan Ginting (2023) menyatakan media online dapat mempublikasikan informasi dengan cepat dan menjangkau cakupan yang sangat luas sehingga media dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat untuk berasumsi sesuai dengan struktur bingkai yang digunakan oleh media tersebut. Namun setiap media pasti memiliki cara membingkainya sendiri sesuai dengan perspektif atau sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing jurnalis.

Natalia (2019) dalam hasil risetnya menyebutkan bahwa meski media memang dapat berperan sebagai *watchdog* terhadap pemerintah terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi sehingga dapat mengerjakan fungsi sebagai penyeimbang, tapi media tidak dapat begitu saja mengurangi laju korupsi. Penyebabnya adalah kurangnya daya ingat masyarakat, kontrol media yang lemah, tarik-menarik kepentingan di ruang redaksi hingga bias pemberitaan pemberantasan korupsi. Akibatnya, meski masyarakat menganggap korupsi penting untuk ditangani segera tapi mereka belum tergerak untuk ikut memberantas korupsi dan menyerahkan pemberantasan korupsi kepada penegak hukum yaitu KPK dan aparat penegak hukum lain. Perlu ada aturan hukum agar pers sebagai *watchdog* dalam pemberantasan korupsi terjaga independensinya sekaligus peningkatan kualitas jurnalis itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, media Islam memiliki peran yang unik karena selain menyampaikan informasi, media ini juga dapat membangun kesadaran moral yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu contoh media Islam yang cukup berpengaruh di Indonesia adalah *Republika.co.id*, sebuah portal berita yang mengedepankan perspektif Islam dalam setiap pemberitaannya. Sebagai media Islam, *Republika.co.id* tidak hanya melaporkan berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga sering mengangkat nilai-nilai moral dan etika yang terdapat dalam ajaran Islam, termasuk dalam pemberitaan mengenai korupsi.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor pesan-pesan anti korupsi yang disampaikan melalui berita-berita di *republika.co.id*. Dengan menggunakan pendekatan analisis konten, artikel ini menganalisis bagaimana *Republika.co.id* menyajikan isu korupsi, serta bagaimana media ini menggunakan prinsip-prinsip Islam untuk mengingatkan publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali peran media Islam dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya anti korupsi sebagai bagian dari nilai moral yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, media seperti *Republika.co.id* diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memerangi korupsi melalui penyampaian pesan yang mengedepankan etika dan moralitas Islam.

Selain itu, artikel ini juga berupaya untuk memberikan wawasan tentang bagaimana media Islam, melalui pemberitaan yang berbasis pada ajaran agama, dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam memperkuat budaya integritas dan anti korupsi di Indonesia.

*Republika.co.id* merupakan salah satu media Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh luas dalam menyebarkan informasi. Dalam konteks ini, artikel ini akan menganalisis bagaimana

Republika.co.id menyampaikan pesan-pesan anti korupsi dan peran media Islam dalam membentuk kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Media massa berfungsi sebagai agen sosial yang memengaruhi opini publik dan menjadi kontrol sosial. Media memiliki kekuatan untuk mengarahkan pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Dalam hal ini, media dapat memainkan peran yang sangat penting dalam memerangi korupsi dengan cara memberikan informasi yang relevan, menyebarkan kesadaran, dan membentuk pola pikir masyarakat tentang pentingnya integritas.

Media Islam adalah media yang beroperasi dengan mengedepankan nilai-nilai ajaran Islam. Islam sebagai agama yang menekankan kejujuran, amanah, dan akuntabilitas memiliki prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk membimbing masyarakat dalam menghindari tindakan korupsi. Dalam konteks ini, media Islam seperti Republika.co.id diharapkan dapat menyampaikan pesan moral yang mendalam mengenai bahaya korupsi dan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan model framing Robert Entman untuk mengidentifikasi pesan-pesan anti korupsi dalam berita-berita yang diterbitkan oleh Republika.co.id. Sampel berita diambil secara acak pada kurun Januari-September 2024. Riset ini fokus kepada analisis konten pada berita-berita terkait korupsi di Republika.co.id. Sampel yang dianalisis terdiri dari artikel-artikel berita yang membahas upaya-upaya pencegahan korupsi. Artikel yang diambil bukan tentang penangkapan pelaku korupsi atau kasus korupsi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan pesan-pesan moral yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam.

Framing berita dengan menggunakan model dari Robert Entman dapat dilakukan dengan empat cara, di antaranya adalah *define of problem*, framing dapat dilakukan dengan penggambaran suatu peristiwa, *diagnosa cause*, framing dilakukan dengan menyebut aktor atau figur dibalik kemunculan masalah, *make moral judgement*, framing dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian atau penegasan terhadap masalah dan *treatment recommendation*, framing dapat dilakukan dengan cara memberikan rekomendasi atau jalan keluar suatu masalah (Eriyanto dalam Sukendro, etal, 2024))

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah kelahiran Republika Online (ROL) di dalam situs resmi <https://www.republika.co.id/page/anniversary> disebutkan bahwa berdirinya ialah bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang Republika Koran. Republika yaitu koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan

komunitas Muslim bagi masyarakat di Indonesia. Penerbitan itu menjadi puncak upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se - Indonesia (ICMI) yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya itu berbuah. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993. Kelahiran ROL pada 1995, Republika memyajikan layanan berita di situs web internet, dengan alamat [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Ini adalah Koran pertama di Indonesia yang tampil di dunia internet, situs itu kemudian dinamakan Republika Online. Republika Online yang biasa disebut ROL muncul kali pertama di internet pada awal 1995 atau sekitar dua tahun setelah surat kabar Republika terbit. Sebagai situs berita, pada saat itu, muatan ROL hanya menduplikasi materi berita-berita koran Republika secara lengkap.

Tujuan utama penerbitan Republika versi internet yakni untuk melayani pembaca yang tidak terjangkau distribusi koran cetak dan untuk pembaca yang berada di luar negeri. Pada fase berikutnya ROL secara bertahap mulai berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Desain dan berbagai layanan web dan materi beritanya pun lebih diperkaya. Sejak pertengahan 2008 ROL mengalami perubahan besar, dari sekadar situs berita sederhana menjadi web portal multimedia. Perubahan tersebut terjadi sebagai jawaban atas munculnya tantangan industri media yang mulai memasuki era konvergensi media. Dalam hal ini, Republika sebagai institusi industri media dituntut untuk memiliki dan mendistribusikan content mediana dalam format cetak, online, dan mobile. Sesuai dengan falsafah dasar Republika, muatan ROL tetap mengedepankan komunitas Muslim sebagai basis pengunjungnya. Tampilan ROL terbaru inilah yang diluncurkan kembali (relaunching) pada 6 Februari 2008.

#### 1. Republika.co.id sebagai Media Islam yang Mengangkat Isu Korupsi

Republika.co.id secara rutin memberitakan kasus-kasus korupsi di Indonesia, baik yang melibatkan pejabat publik maupun sektor swasta. Berita-berita ini tidak hanya menggambarkan fakta-fakta kasus, tetapi juga memberikan penekanan pada sisi moral dari tindakan tersebut. Misalnya, dalam pemberitaan tentang vonis hukuman terhadap pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, Republika.co.id seringkali menekankan aspek tanggung jawab moral dan etika, serta pentingnya kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas publik.

#### 2. Pesan-pesan Anti Korupsi dalam Perspektif Islam

Di dalam artikel yang diterbitkan oleh Republika.co.id, terdapat pesan-pesan yang jelas terkait dengan larangan korupsi menurut ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa korupsi adalah bentuk penyalahgunaan amanah yang merusak masyarakat dan merugikan orang banyak. Beberapa nilai yang sering ditekankan antara lain:

- Amanah (Kepercayaan): Korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Setiap individu yang memegang kekuasaan diharapkan untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan integritas tinggi.
- Kejujuran: Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Korupsi, sebagai bentuk penipuan dan kebohongan, bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam.

- Akuntabilitas: Dalam ajaran Islam, setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, korupsi adalah tindakan yang sangat dilarang karena merusak akuntabilitas sosial dan politik.

### 3. Media Islam dalam Pembentukan Kesadaran Publik

Selama ini, media dikenal peran-perannya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mengedukasi, fungsi kontrol sosial dan lembaga ekonomi. Tak hanya itu, di dalam media Islam, kehadirannya juga sebagai sarana untuk berdakwah. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media Islam seperti *Republika.co.id* memiliki pengaruh dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Masyarakat, terutama umat Islam, lebih mudah menerima dan menginternalisasi pesan moral yang disampaikan melalui media yang memiliki kesamaan dalam prinsip ajaran agama. *Republika.co.id*, dengan sudut pandangnya yang Islam, berperan penting dalam membangun karakter publik yang anti korupsi.

Salah satu peran utama media dalam pendidikan karakter anti-korupsi adalah sebagai agen perubahan sosial. Media memiliki kekuatan untuk menyoroti kasus-kasus korupsi, mengkritik praktik-praktik koruptif, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Melalui liputan yang teliti dan berimbang, media dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi. Media juga dapat berperan sebagai sarana pendidikan. Dengan menyajikan informasi tentang nilai-nilai moral dan etika yang mencegah korupsi, media dapat membantu membentuk karakter yang kuat dan anti-korupsi pada generasi muda. (Darsana et.al, 2024).

Berikut ini daftar sampel artikel berita yang mengandung pesan-pesan anti korupsi:

Tabel 1

Sampel Berita Anti Korupsi di *republika.co.id*

No	Judul Berita	Tanggal Muat dan Link	Pesan-pesan Anti Korupsi
1.	FHUI: Antikorupsi Harus Dipraktikkan Capres dan Timnya Sejak Kampanye	17 Januari 2024 <a href="https://news.republika.co.id/berita/s7ebtk423/fhui-antikorupsi-harus-dipraktikkan-capres-dan-timnya-sejak-kampanye">https://news.republika.co.id/berita/s7ebtk423/fhui-antikorupsi-harus-dipraktikkan-capres-dan-timnya-sejak-kampanye</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan prinsip antikorupsi sejak masa kampanye.</li> <li>2. permasalahan korupsi wajib mendapat perhatian besar dari para Capres</li> <li>3. Capres dan timnya sepatutnya tak terilit isu korupsi. Capres dan timnya bebas dari isu korupsi.</li> <li>4. program Paku Integritas telah dijalankan KPK sejak tahun 2021. Kegiatan itu bertujuan untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi.</li> </ol>

2.	15 Mantan Pimpinan KPK Beri Pesan Moral ke Jokowi, Ingatkan Soal Bansos	6 Februari 2024 <a href="https://news.republika.co.id/berita/s8f6ds436/15-mantan-pimpinan-kpk-beri-pesan-moral-ke-jokowi-ingatkan-soal-bansos%20">https://news.republika.co.id/berita/s8f6ds436/15-mantan-pimpinan-kpk-beri-pesan-moral-ke-jokowi-ingatkan-soal-bansos%20</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden dan seluruh Penyelenggara Negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya</li> <li>2. Presiden dan para penyelenggara negara agar melaksanakan 'Panca Laku'</li> <li>3. Memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sekaligus menjadi teladan dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi.</li> <li>4. Menghindari segala benturan kepentingan karena benturan kepentingan adalah akar sekaligus langkah awal menuju praktik korupsi.</li> <li>5. Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Termasuk tata kelola penyaluran bansos disesuaikan daftar penerima yang sah berdasarkan nama dan alamat.</li> <li>6. Para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum Polri-Kejaksaan dan TNI diharapkan terus mengedepankan sikap imparial, adil, dan tidak berpihak mendukung calon presiden/calon wakil presiden/calon legislatif tertentu.</li> <li>7. Menjamin tegaknya hukum (rule of law) dan bukan rule by law. Hal ini disebabkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan rule of law cenderung ditinggalkan.</li> </ol>
3.	Dosen UMM Tekankan Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi	20 April 2024 <a href="https://news.republika.co.id/berita/sc82ub330/dosen-umm-tekankan-pentingnya-pendidikan-antikorupsi">https://news.republika.co.id/berita/sc82ub330/dosen-umm-tekankan-pentingnya-pendidikan-antikorupsi</a>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya pendidikan anti-korupsi dalam muatan kurikulum.</li> <li>2. Pendidikan anti-korupsi bakal membantu mewujudkan Indonesia bebas korupsi</li> <li>3. <i>"Melalui pendidikan anti-korupsi, dapat memberikan kesempatan</i></li> </ol>

			<p><i>bagi siswa untuk memahami akar permasalahan korupsi, mengenali tindakan-tindakan yang melanggar integritas, dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya etika dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari," (Nurul Zuriah)</i></p> <p>4. Pendidikan anti-korupsi dapat membentuk karakter anak bangsa yang berintegritas dan berani menolak korupsi, mengajarkan pemahaman tentang dampak negatif korupsi baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan.</p>
4.	Bus Anti Korupsi KPK Mejang di Gedung Sate, Pj Gubernur Bey Ingatkan Bahaya Korupsi	<p>8 Agustus 2024</p> <p><a href="https://rejabar.republika.co.id/berita/shw3vh512/bus-anti-korupsi-kpk-mejang-di-gedung-sate-pj-gubernur-bey-ingatkan-bahaya-korupsi?">https://rejabar.republika.co.id/berita/shw3vh512/bus-anti-korupsi-kpk-mejang-di-gedung-sate-pj-gubernur-bey-ingatkan-bahaya-korupsi?</a></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran bus anti korupsi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li> <li>2. Mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) tentang bahaya korupsi. Ia mengatakan korupsi harus menjadi musuh bersama yang dilawan secara konsisten.</li> <li>3. Perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri, keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun tempat kerja.</li> <li>4. Masalah korupsi bukan hanya urusan KPK akan tetapi tanggung jawab bersama.</li> <li>5. Jadilah agen anti korupsi di ruang lingkup keluarga, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini kepada anak-anak kita.</li> <li>6. Mengajak seluruh kepala daerah untuk ikut memberantas korupsi.</li> <li>7. Roadshow bus KPK 2024 ini dapat menjadi momentum bagi kita memperkuat komitmen dalam memberantas korupsi.</li> </ol>
5.	Cara Umar bin Abdul Aziz Didik Anak Jadi Anti-Korupsi	<p>16 Agustus 2024</p> <p><a href="https://khazanah.republika.co.id/berita/siajyv451/cara-umar-bin-abdul-">https://khazanah.republika.co.id/berita/siajyv451/cara-umar-bin-abdul-</a></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>"Takutlah wahai anakku. Di akhirat kelak, kamu akan membawa harta itu ke hadapan Allah untuk</i></li> </ol>

		<p>aziz-didik-anak-jadi-antikorupsi-part2</p>	<p><i>mempertanggungjawabkannya.</i>" (Umar bin Abdul Aziz)</p> <p>2. "Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (Q.S.Ali Imran: 161)</p> <p>3. Tafsir Q.S.Ali Imran: 161. Berkhianat adalah menyembunyikan harta ghanimah dan berkhianat kepada setiap harta yang di pegang oleh seseorang, ghulul ini dalah haram menurut ijma bahkan ia termasuk dalam dosa besar, sebagai mana yang di tunjukan oleh ayat yang mulia tersebut dan ayat-ayat lainnya dari nash-nash yang ada. Allah mengabarkan bahwasanya tidaklah patut dan tidak mungkin seorang Nabi itu melakukan khianat, karena berkhianat itu sebagaimana yang telah anda ketahui termasuk dosa-dosa yang besar dan sejahat-jahatnya Aib. Sungguh Allah telah memelihara para nabinya dari segala hal yang mengotori dan menjatuhkan mereka, dan dia menjadikan mereka orang-orang yang terbaik akhlaknya di seluruh alam dan orang yang paling bersih jiwanya. Allah membersihkan, memperbaiki, dan menyucikan mereka sebagai tempat risalahnya dan kandungan hikmahnya. Allah membuat ancaman bagi orang yang berbuat khianat dalam firman-Nya "Barangsiapa</p>
--	--	---	--

			<p>bekhianat dalam urusan barang rampasan itu, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa sesuatu yang dikhianatkannya itu Maksudnya pembawa ghanimah itu membawanya dengan cara memikulnya di atas punggungnya, baik harta itu berupa hewan maupun barang atau selainya, dimana ia akan disiksa denganya pada hari kiamat. "Kemudian tiap-tiap diri akan di beri pembalasan tentang apa yang dia kerjakan pembalsan setimpal," seorang yang berkhianat atau orang lain, masing-masing akan di berikan ganjaran atas dosanya, seukuran apa yang dikerjakannya, "sedang mereka tidak dianiaya" maksudnya, tidak di tambah kejelekan mereka dan tidak pula mengurang sedikitpun kebaikan mereka.</p>
--	--	--	--

Merujuk kepada tabel 1 di atas, berikut ini uraian analisis berita-berita tersebut secara terperinci.

### 1. **Berita FHUI: Antikorupsi Harus Dipraktikkan Capres dan Timnya Sejak Kampanye**

*Pertama*, definisi masalah yaitu berita tersebut mengangkat isu besar tentang korupsi dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus pada capres dan tim kampanyenya. Isu yang diangkat adalah pentingnya praktik antikorupsi sejak tahap kampanye, bukan hanya sebagai janji dalam pidato politik, tetapi sebagai tindakan nyata yang diterapkan oleh capres dan timnya. Masalah utama yang dibingkai adalah korupsi dalam politik dan pentingnya capres serta tim kampanyenya untuk mempraktikkan nilai-nilai antikorupsi sejak awal kampanye. Ini juga menyoroti ketidakpercayaan publik terhadap janji politik, sehingga menekankan pentingnya konsistensi antara kata dan tindakan.

*Kedua*, diagnosis penyebab yakni ada dua kemungkinan. Berita ini mungkin menyoroti bahwa korupsi dalam pemerintahan terjadi bukan hanya karena tindakan individual, tetapi juga karena kebiasaan atau budaya politik yang berkembang selama masa kampanye dan pemilu. Dalam hal ini, penyebabnya adalah ketidakterbukaan, ketidaksinambungan antara kampanye dan pemerintahan, serta ketidakmampuan tim kampanye dalam menjaga integritas. Korupsi dianggap

sebagai akibat dari budaya politik yang permisif terhadap praktik korupsi dan kurangnya pengawasan terhadap calon dan tim kampanye yang berpotensi melakukan praktik tidak transparan atau tidak jujur.

*Ketiga*, evaluasi moral dari pemberitaan itu adalah membingkai tindakan korupsi sebagai penyimpangan dari nilai moral dan etika politik yang seharusnya dipegang oleh para calon pemimpin. Secara eksplisit atau implisit, berita ini mengkritik ketidaksesuaian antara klaim kampanye dengan tindakan nyata. Ada evaluasi moral bahwa calon yang tidak menerapkan praktik antikorupsi dalam kampanye mereka dianggap tidak layak untuk memimpin negara karena mereka gagal memenuhi harapan moral masyarakat. Artikel ini membingkai antikorupsi bukan hanya sebagai tuntutan hukum tetapi juga sebagai tuntutan moral, di mana masyarakat mengharapkan calon presiden untuk menjadi contoh yang baik. Framing ini membangun ketegasan terhadap korupsi sebagai masalah yang harus dilawan dalam segala aspek politik.

*Keempat*, rekomendasi atau solusi dari pemberitaan ini yakni menekankan bahwa praktik antikorupsi harus dimulai sejak awal kampanye dan bukan hanya menjadi slogan di akhir pemilu. Penulis atau sumber dalam artikel ini mungkin menyarankan agar capres dan tim kampanyenya menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatan kampanye. Dengan kata lain, mereka menyarankan agar capres dan tim kampanyenya tidak hanya berbicara tentang antikorupsi, tetapi juga membuktikannya dalam perilaku sehari-hari mereka. Di samping itu, pemilihan pemimpin yang antikorupsi harus dimulai dari praktik yang baik selama kampanye. Calon presiden dan tim kampanyenya diharapkan untuk menunjukkan komitmen terhadap integritas dan meminimalkan potensi praktik korupsi yang mungkin terjadi dalam proses kampanye.

Secara terperinci, elemen-elemen framing berikut ini tercermin di dalam berita pemilihan kata-kata seperti "harus dipraktikkan", "komitmen antikorupsi", "integritas", dan "transparansi" untuk menggambarkan tuntutan moral yang sangat kuat terhadap calon presiden dan timnya. Hal ini menggambarkan sebuah standar moral yang tinggi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang calon pemimpin. Berita ini bisa menekankan ketidaksesuaian antara retorika kampanye yang sering kali berfokus pada janji-janji perubahan dan tindakan nyata yang lebih sering mengabaikan atau bahkan mendukung praktik-praktik yang merugikan rakyat, seperti korupsi.

Secara garis besar, berita tentang "FHUI: Antikorupsi Harus Dipraktikkan Capres dan Timnya Sejak Kampanye" membingkai isu korupsi dalam politik dengan menekankan pentingnya integritas calon pemimpin sejak tahap kampanye. Melalui framing ini, media menyuarakan pentingnya nilai moral dan etika dalam setiap aspek kampanye, sambil memberikan rekomendasi

agar calon presiden dan timnya menunjukkan komitmen terhadap antikorupsi melalui tindakan nyata, bukan hanya janji. Framing ini diharapkan dapat memengaruhi persepsi publik dan mendorong praktik politik yang lebih bersih dan transparan.

## 2. **Berita 15 Mantan Pimpinan KPK Beri Pesan Moral ke Jokowi, Ingatkan Soal Bansos**

Dalam berita ini, masalah yang diangkat adalah potensi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah, yang bisa menimbulkan korupsi atau penyimpangan. Melalui pesan moral dari 15 mantan pimpinan KPK, berita ini berusaha untuk memperingatkan Presiden Jokowi agar lebih berhati-hati dalam mengelola distribusi bantuan sosial agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh kelompok yang memiliki kepentingan politik.

Pertama, definisi masalah pada berita itu dimungkinkan karena adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam distribusi bantuan sosial. Meskipun bantuan sosial seharusnya untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan, risiko penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tetap ada, dan hal ini menjadi perhatian besar bagi mantan pimpinan KPK.

Kedua, berita ini mendiagnosis bahwa masalah penyalahgunaan bantuan sosial bisa disebabkan oleh keterlibatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik itu pejabat pemerintah yang memiliki akses langsung terhadap distribusi bansos, maupun kepentingan politik yang memanfaatkan bansos untuk meraih dukungan massa dalam konteks pemilu atau situasi politik tertentu. Penyalahgunaan atau ketidaktepatan distribusi bansos dapat terjadi karena adanya kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau politik. Selain itu, kurangnya pengawasan atau transparansi dalam mekanisme distribusi juga bisa menjadi penyebab terjadinya penyelewengan dalam bantuan sosial tersebut.

*Ketiga*, framing dalam berita ini menekankan aspek moral dari peringatan yang diberikan oleh mantan pimpinan KPK. Mereka mengingatkan Presiden Jokowi bahwa bansos harus disalurkan dengan integritas tinggi, dengan memastikan bahwa bantuan sampai kepada pihak yang berhak dan tidak digunakan untuk tujuan politis atau keuntungan pribadi. Evaluasi moral ini menggambarkan bahwa korupsi dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Pesan moral yang terkandung dalam peringatan ini adalah bahwa penyalahgunaan bantuan sosial adalah pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik, yang dapat merusak legitimasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara. Mantan pimpinan KPK menekankan bahwa integritas dan keadilan adalah nilai moral yang harus dijaga, terutama dalam pengelolaan dana yang bersumber dari rakyat.

*Keempat*, berita ini mengandung rekomendasi moral dan solusi praktis terkait pengelolaan bantuan sosial. Pesan yang disampaikan oleh mantan pimpinan KPK jelas, yaitu agar Presiden

Jokowi lebih berhati-hati dalam mengelola bansos, memastikan bahwa distribusi bantuan tersebut dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanpa adanya intervensi politik. Pengawasan yang ketat dan transparansi dalam setiap proses distribusi bansos untuk mencegah penyalahgunaan. Peningkatan sistem akuntabilitas, baik melalui KPK maupun lembaga lain yang berfungsi mengawasi distribusi bantuan. Pencegahan campur tangan politik dalam distribusi bansos yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Framing dalam berita ini dapat dianalisis melalui cara penyajian pemilihan kata seperti "pesan moral", "peringatan", "ingatkan", dan "bansos" memberikan kesan bahwa ini adalah isu yang sangat serius dan moral, yang memerlukan perhatian ekstra. Penyajian pesan moral yang diberikan oleh mantan pimpinan KPK memperkuat kesan bahwa masalah ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin.

Dengan menyebutkan 15 mantan pimpinan KPK, framing ini seakan menekankan bahwa integritas dan pengalaman mereka dalam memberantas korupsi memberi mereka otoritas moral untuk memberikan pesan kepada Presiden Jokowi. Ini memberi kesan bahwa mereka berbicara dari sudut pandang yang berwibawa dan memiliki kompetensi moral dan teknis dalam masalah ini.

Framing ini secara tidak langsung mengkritik pemerintah (terutama Presiden Jokowi) dengan menunjukkan bahwa ada risiko besar terkait penyalahgunaan bantuan sosial. Framing ini mengandung kritik bahwa meskipun pemerintah sudah memiliki niat baik, pengelolaan bansos masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui analisis framing ini, kita dapat melihat bahwa berita "15 Mantan Pimpinan KPK Beri Pesan Moral ke Jokowi, Ingatkan Soal Bansos" membingkai masalah bansos dan korupsi dalam konteks tanggung jawab moral dan integritas pemerintah. Framing ini menggugah kesadaran akan risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam distribusi bantuan sosial dan menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah. Dalam kerangka ini, pesan moral dari mantan pimpinan KPK menjadi kritik terhadap kemungkinan penyimpangan yang bisa terjadi, dengan rekomendasi untuk mengawal secara ketat setiap proses distribusi bansos agar tidak tercemar oleh kepentingan politik.

### **3. Berita Dosen UMM Tekankan Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi**

Berita ini sepertinya berfokus pada upaya akademik dalam menangani masalah korupsi melalui pendidikan anti-korupsi, yang merupakan bagian penting dalam memerangi budaya korupsi di Indonesia. Berikut analisis konteks framing berita ini.

*Pertama*, dalam berita ini, masalah yang diangkat adalah budaya korupsi yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia, yang menurut dosen UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) harus segera ditanggulangi dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Masalah utama yang ditekankan adalah bahwa korupsi bukan hanya merupakan masalah perilaku individu, tetapi juga masalah budaya dan sistem yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik. Korupsi yang mengakar di masyarakat, termasuk dalam lingkup pemerintahan, swasta, dan bahkan dunia pendidikan itu sendiri. Fokusnya adalah pada perluasan pendidikan anti-korupsi sebagai salah satu cara efektif untuk membentuk budaya yang lebih bersih dan lebih adil di masa depan.

*Kedua*, framing dalam berita ini mendiagnosis bahwa korupsi di Indonesia terjadi karena adanya budaya yang permisif terhadap tindakan korupsi, di mana perilaku ini sudah dianggap biasa dan diterima dalam berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya pendidikan moral dan etika yang mengajarkan tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab utama yang ditekankan adalah kekurangan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya korupsi dalam masyarakat. Budaya korupsi dapat tumbuh subur karena tidak adanya penguatan nilai-nilai integritas sejak dini, terutama dalam dunia pendidikan dan lingkungan akademis.

*Ketiga*, berita ini memanfaatkan evaluasi moral yang mengutuk tindakan korupsi sebagai penyimpangan dari nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pendidikan anti-korupsi disorot sebagai salah satu solusi penting untuk menciptakan generasi yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan etika yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak masa depan bangsa. Pendidikan anti-korupsi dianggap sebagai upaya moral untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam diri setiap individu.

*Keempat*, sebagai solusi, berita ini menganjurkan pentingnya pendidikan anti-korupsi di setiap jenjang pendidikan, terutama di universitas, sebagai langkah preventif untuk membentuk generasi yang lebih sadar akan bahaya korupsi dan lebih berkomitmen untuk mencegahnya. Solusi ini mencakup implementasi kurikulum yang lebih menekankan pada pendidikan karakter dan etika publik, dengan tujuan utama untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan uang negara. Penguatan kurikulum pendidikan anti-korupsi di sekolah dan universitas, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penyuluhan dan pengajaran tentang integritas dan tanggung jawab sosial yang lebih intensif di kalangan mahasiswa, dengan memperkenalkan mereka pada contoh-contoh praktik baik dan buruk dalam kehidupan sosial-

politik. Pendidikan karakter dan etika publik yang menanamkan nilai-nilai moral yang kokoh dalam setiap individu, yang nantinya diharapkan bisa mempengaruhi sistem sosial dan politik yang lebih luas.

Penyajian Framing dalam Berita ini yaitu pada pemilihan kata-kata seperti "pentingnya pendidikan anti-korupsi", "budaya korupsi", "pendidikan karakter", dan "tanggung jawab sosial" menciptakan citra bahwa masalah korupsi adalah masalah yang bersifat sistemik dan moral, dan harus diselesaikan melalui pendidikan dan pembentukan karakter sejak dini. Ini memberi kesan bahwa pendekatan terhadap korupsi harus dimulai dengan mengubah nilai-nilai sosial dan etika dalam masyarakat.

Berita ini menyarankan solusi berupa pendidikan, yang dianggap lebih fundamental dan jangka panjang daripada hanya mengandalkan upaya penegakan hukum. Hal ini memberi kesan bahwa untuk mengatasi masalah korupsi, kita perlu memperbaiki akar penyebabnya, yaitu budaya dan perilaku masyarakat.

Dengan melibatkan dosen dari universitas (dalam hal ini dosen UMM), berita ini memberikan otoritas akademik terhadap pentingnya pendidikan anti-korupsi. Ini juga menciptakan framing bahwa solusi terhadap masalah korupsi harus berbasis pada pengetahuan, pemikiran kritis, dan moral yang kuat.

Framing ini memberikan kritik terhadap kekurangan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral, di mana masyarakat yang tidak dibekali dengan pendidikan anti-korupsi mungkin tidak cukup sadar akan dampak buruk dari korupsi. Ini secara tidak langsung menuntut transformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk lebih fokus pada pembentukan karakter yang bersih dan berintegritas.

Melalui analisis framing ini, bisa dilihat bahwa berita "Dosen UMM Tekankan Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi" membingkai korupsi sebagai masalah budaya yang harus diatasi melalui pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Framing ini juga menekankan bahwa solusi terhadap masalah korupsi harus dimulai dengan pendidikan anti-korupsi sejak dini, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci untuk membentuk masyarakat yang lebih bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.

#### **4. Berita Bus Anti Korupsi KPK Mejang di Gedung Sate**

*Pertama*, definisi masalah dalam berita ini mengangkat isu korupsi sebagai masalah serius yang merusak integritas dan perkembangan negara. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya dipandang

sebagai kejahatan ekonomi, tetapi sebagai masalah yang lebih besar yang mengancam keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Bus anti-korupsi KPK sebagai simbol dan sarana untuk menyebarkan pesan pencegahan korupsi, dipajang di Gedung Sate, kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.

Korupsi adalah ancaman besar terhadap pembangunan negara dan integritas pemerintah, dan pendidikan publik tentang bahaya korupsi perlu dilakukan secara masif untuk menciptakan kesadaran kolektif yang dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di semua sektor, baik pemerintahan maupun masyarakat.

*Kedua*, framing dalam berita ini mendiagnosis bahwa penyebab korupsi adalah ketidakterbukaan, rendahnya pengawasan, dan budaya permisif yang ada di kalangan pejabat publik. Korupsi dianggap sebagai produk dari kurangnya kesadaran moral dan etika di kalangan beberapa aparatur negara, serta lemahnya sistem pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Penyebab utama korupsi adalah kurangnya transparansi dan pengawasan, serta kultur yang toleran terhadap praktik-praktik korupsi. Masyarakat dan pejabat pemerintah sering kali menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, sehingga pencegahannya perlu dimulai dengan membangun kesadaran bersama melalui pendidikan publik dan penguatan sistem hukum yang ada.

*Ketiga*, framing ini memberikan evaluasi moral yang jelas terhadap tindakan korupsi. Korupsi dipandang sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial, menciptakan ketidakadilan, dan menghambat perkembangan negara. Dalam hal ini, Pj Gubernur Bey mengingatkan bahwa korupsi merupakan ancaman besar yang harus diberantas demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan adil. Korupsi dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap etika dan norma yang merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Bus anti-korupsi berfungsi sebagai simbol moral yang mengingatkan masyarakat bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah moral yang harus dihadapi dengan serius.

*Keempat*, solusi yang diusung dalam berita ini adalah pendidikan publik tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas melalui simbol-simbol yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti bus anti-korupsi yang dapat bergerak ke berbagai daerah untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan. Pj Gubernur Bey mengingatkan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di semua lapisan masyarakat. Pendidikan anti-korupsi yang lebih masif dan terstruktur, dimulai sejak usia dini dan diintegrasikan dalam berbagai sektor pendidikan. Peningkatan pengawasan terhadap para pejabat publik, dengan dukungan dari

lembaga seperti KPK yang terus memperkenalkan kampanye anti-korupsi di berbagai daerah. Penggunaan simbol-simbol pendidikan seperti bus anti-korupsi yang dapat bergerak dan mengedukasi masyarakat secara langsung, sehingga pesan pencegahan korupsi dapat sampai ke tingkat yang lebih luas.

Framing dalam berita ini berfokus pada aktivitas simbolis dan pendidikan masyarakat dalam menghadapi masalah korupsi. Beberapa elemen framing yang dapat diidentifikasi adalah:

Penggunaan kata seperti "mejeng", "ingatkan", dan "bahaya korupsi" memberikan kesan bahwa masalah korupsi adalah serius dan harus segera ditanggulangi dengan berbagai cara, termasuk melalui simbol-simbol pendidikan yang dapat menjangkau masyarakat luas. Bus anti-korupsi dihadirkan sebagai simbol yang berpindah-pindah, sehingga mengisyaratkan bahwa pencegahan korupsi harus bersifat dinamis, bergerak terus-menerus dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Framing ini memperlihatkan betapa pentingnya untuk terus-menerus mengingatkan masyarakat tentang bahaya korupsi.

Framing ini menggarisbawahi bahwa korupsi merupakan konflik moral yang perlu diselesaikan. Penggunaan bus sebagai alat edukasi bergerak menciptakan citra bahwa kampanye anti-korupsi adalah hal yang proaktif dan terus-menerus dilakukan untuk membangun kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Framing ini juga memberikan otoritas moral kepada KPK yang diwakili oleh bus anti-korupsi. Dengan mengangkat KPK sebagai lembaga yang berperan besar dalam pencegahan korupsi, berita ini menekankan pentingnya dukungan dari lembaga yang sudah dikenal memiliki kredibilitas dalam memberantas korupsi.

Bus anti-korupsi yang dipajang di Gedung Sate berfungsi sebagai simbol visual yang kuat untuk mengingatkan masyarakat bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan dengan cara yang lebih terlihat dan menyentuh langsung masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga melalui kampanye edukasi yang kreatif dan terjangkau bagi semua kalangan.

Dalam analisis framing berita "Bus Anti-Korupsi KPK Mejeng di Gedung Sate", dapat dilihat bahwa media membingkai korupsi sebagai ancaman besar terhadap integritas dan keadilan sosial yang harus segera diatasi dengan pendekatan pendidikan yang lebih kreatif dan simbolis. Bus anti-korupsi yang dipajang di Gedung Sate berfungsi sebagai alat edukasi yang membawa pesan moral tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pemerintahan, serta mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya korupsi. Framing ini mendorong pemahaman bahwa

pendidikan anti-korupsi harus dilakukan secara dinamis dan menyeluruh, dengan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan, dan KPK berperan sebagai penggerak utama dalam kampanye ini.

##### 5. **Berita Cara Umar bin Abdul Aziz Didik Anak Jadi Anti-Korupsi**

Berita ini tampaknya berfokus pada pendekatan moral dan pendidikan dalam membentuk karakter anak agar memiliki sikap anti-korupsi, dengan menggunakan contoh teladan dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikenal karena integritas dan upayanya dalam memerangi korupsi di pemerintahannya. Dengan menggunakan kerangka teori framing yang terdiri dari empat elemen: definisi masalah, diagnosis penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi atau solusi, berikut ini framing berita itu

*Pertama*, dalam berita ini, korupsi dianggap sebagai masalah sosial dan moral yang mengancam stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Fokus utama berita adalah bagaimana pendidikan moral dan teladan pribadi dapat membentuk karakter anak-anak untuk menghindari perilaku korupsi. Contoh yang digunakan adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal dengan kepemimpinan bersih dan prinsip anti-korupsi. Pendidikan yang diterapkan pada anak-anak Umar bin Abdul Aziz menjadi contoh bagaimana nilai-nilai integritas dapat ditanamkan sejak dini untuk mencegah munculnya perilaku korupsi.

Korupsi yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik pemerintahan, bisnis, maupun sosial, merupakan ancaman serius. Pencegahannya harus dimulai dengan pendidikan karakter, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak usia dini.

*Kedua*, framing berita ini mendiagnosis bahwa penyebab utama korupsi adalah kurangnya pendidikan moral, kurangnya contoh teladan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan. Dalam konteks ini, berita menyoroti bahwa pendidikan yang hanya berfokus pada aspek teknis dan akademis tidak cukup untuk mencegah perilaku koruptif. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah pentingnya pendidikan karakter yang ditanamkan dalam keluarga, sebagai dasar yang kuat dalam membentuk kepribadian yang anti-korupsi.

Korupsi dapat terjadi karena kekurangan pendidikan moral, ketidaktahuan tentang dampak buruk dari perilaku korupsi, dan kegagalan dalam menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini. Ketika masyarakat tidak diberikan contoh yang baik dalam hal etika dan tanggung jawab, mereka lebih rentan terjerumus dalam perilaku yang merusak.

*Ketiga*, dalam berita ini, korupsi dianggap sebagai penyimpangan moral yang serius. Framing ini menggambarkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan moral masyarakat. Dengan menggunakan contoh Umar bin

Abdul Aziz, yang terkenal dengan kepemimpinan yang jujur dan bersih, berita ini memberikan evaluasi moral bahwa seorang pemimpin yang sukses harus memimpin dengan contoh, dan penting untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi pada generasi muda sejak dini.

Korupsi dipandang sebagai kejahatan moral yang tidak hanya merusak struktur negara dan ekonomi, tetapi juga merusak karakter individu. Pendidikan anti-korupsi harus dimulai dari nilai moral yang kuat, yang dapat membentuk pribadi yang memiliki integritas tinggi. Umar bin Abdul Aziz dijadikan contoh teladan sebagai pemimpin yang berhasil menciptakan keadilan sosial dan memperbaiki moralitas publik di bawah pemerintahannya.

*Keempat*, berita ini mengusulkan solusi berupa penerapan pendidikan karakter yang berfokus pada nilai-nilai moral dan etika, dengan mencontoh cara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam mendidik anak-anaknya. Solusinya adalah melalui pendidikan sejak dini, baik dalam keluarga maupun di sekolah, yang mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sebagai dasar untuk menghindari korupsi. Solusi ini mengindikasikan bahwa pendidikan moral yang dimulai sejak usia muda akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menanggulangi korupsi. Integrasi pendidikan moral dan karakter ke dalam kurikulum sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Penerapan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama. Pendidikan teladan dari orang tua dan pemimpin, di mana mereka menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan mereka, mengajarkan anak-anak untuk meneladani perilaku positif. Kepemimpinan yang berbasis pada moralitas dan etika, seperti yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, sebagai model yang bisa diikuti oleh pemimpin masa kini.

Framing dalam berita ini sangat kuat dalam menekankan pendidikan moral dan nilai-nilai integritas untuk mencegah korupsi, dengan mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai figur yang ideal dalam membentuk karakter anak-anak. Berikut adalah beberapa elemen framing yang digunakan dalam penyajian berita ini: Penggunaan kata-kata seperti "anti-korupsi", "pendidikan karakter", "Umar bin Abdul Aziz", dan "didik anak" memberikan kesan bahwa pencegahan korupsi adalah proses yang harus dimulai sejak dini melalui pendidikan moral yang kuat. Umar bin Abdul Aziz digambarkan sebagai contoh pemimpin yang mempraktikkan nilai-nilai moral dalam hidupnya, menjadikannya simbol yang menginspirasi.

Framing berita ini memberikan gambaran bahwa pendidikan anti-korupsi dapat dimulai dari keluarga, dengan menekankan bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajarkan anak-anaknya untuk menghindari perilaku koruptif melalui pendidikan karakter. Ini memberikan pesan bahwa

pendidikan moral harus dimulai dari orang tua, yang kemudian akan berpengaruh besar pada generasi masa depan. Berita ini menggambarkan pentingnya keluarga sebagai lingkungan pertama untuk menanamkan nilai-nilai anti-korupsi. Selain itu, media juga memberikan peran yang penting kepada pemimpin masyarakat untuk menjadi contoh yang baik dalam hal integritas, sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz.

Dengan menyoroti pendidikan anti-korupsi melalui contoh teladan, framing ini menggarisbawahi bahwa pendidikan karakter adalah langkah awal dalam membentuk masyarakat yang bebas dari korupsi. Pendidikan ini harus mengedepankan nilai-nilai moral yang menciptakan individu yang memiliki integritas dan kejujuran sebagai bagian dari jati diri mereka.

Melalui analisis framing ini, dapat diamati bahwa berita "Cara Umar bin Abdul Aziz Didik Anak Jadi Anti-Korupsi" membingkai korupsi sebagai masalah moral yang perlu diatasi dengan pendidikan karakter sejak dini. Umar bin Abdul Aziz dijadikan contoh teladan sebagai pemimpin yang berhasil menanamkan nilai-nilai anti-korupsi dalam keluarganya. Framing ini menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dengan pendidikan moral yang kuat di lingkungan keluarga dan sekolah, dan ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki integritas tinggi untuk menghadapi tantangan sosial dan politik.

## PENUTUP

### Simpulan

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, dan media massa, termasuk media Islam, memainkan peran penting dalam mengedukasi dan membentuk kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, *Republika.co.id* sebagai media Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan moral yang berlandaskan pada ajaran Islam terkait korupsi.

Melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran (*al-sidq*), amanah, dan akuntabilitas, *Republika.co.id* telah berupaya menyampaikan pesan anti korupsi yang tidak hanya mencakup fakta hukum dan politik, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpikir dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam agama Islam. Pemberitaan yang menghubungkan isu korupsi dengan perspektif ajaran Islam ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat, serta mendorong pembaca untuk menjauhi perilaku tersebut. Selain itu, media Islam seperti *Republika.co.id* berperan dalam meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan pendekatan berbasis agama, *Republika.co.id* mampu menyentuh aspek moral individu dan masyarakat, serta mengajak pembaca untuk menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi.

Secara keseluruhan, *Republika.co.id* telah menunjukkan peranannya sebagai agen perubahan yang dalam membentuk kesadaran moral publik terhadap pentingnya pencegahan dan pemberantasan

korupsi. Melalui pemberitaan yang konsisten dan berbasis nilai Islam, media Islam ini dapat memperkuat budaya integritas di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi. Oleh karena itu, media Islam seperti *Republika.co.id* memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan memanfaatkan nilai-nilai agama sebagai fondasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pesan-pesan anti korupsi dalam pemberitaan *Republika.co.id*, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan peran media Islam dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Pertama*, Memperkuat Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Berita Sosial dan Politik *Kedua*, Meningkatkan Kolaborasi dengan Lembaga Anti-Korupsi. *Ketiga*, Meningkatkan Penyajian Konten Edukasi dan Pembelajaran tentang Etika dan Integritas. *Keempat*, Menggunakan Pendekatan Visual dan Interaktif dalam Kampanye Anti Korupsi. *Kelima*, Penyuluhan tentang Akuntabilitas dan Transparansi Melalui Platform Digital. *Keenam*, Penguatan Peran Jurnalis dan Wartawan dalam Penyebaran Nilai Anti Korupsi. *Ketujuh*, Menguatkan Peran Media Islam dalam Mendorong Perubahan Kebijakan. Penyusun berharap riset ini dapat ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Desca Lidya Natalia. 2019. Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (2), 57-73 Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
- Gregorius Genep Sukendro, Muhammad Gafar Yoedjadi, Nigar Pandarianto. 2024. Kecerdasan Buatan Dalam Evolusi Media dan Komunikasi. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Maulana Andinata Dalimunthe &, Cici Handayani Br Ginting. 2023. Framing Analysis of Reporting on the Corruption Case of Langkat Governor in Online Media Waspada.co.id *Jurnal Digital Media Communication*, Vol. 02 (1),
- I.Made Darsana et.al. 2024. Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi. Badung, Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media.
- Republika.co.id 23<sup>th</sup>. <https://www.republika.co.id/page/anniversary>
- FHUI: Antikorupsi Harus Dipraktikkan Capres dan Timnya Sejak Kampanye. 17 Januari 2024. <https://news.republika.co.id/berita/s7ebtk423/fhui-antikorupsi-harus-dipraktikkan-capres-dan-timnya-sejak-kampanye>
- 15 Mantan Pimpinan KPK Beri Pesan Moral ke Jokowi, Ingatkan Soal Bansos. 6 Februari 2024. <https://news.republika.co.id/berita/s8f6ds436/15-mantan-pimpinan-kpk-beri-pesan-moral-ke-jokowi-ingatkan-soal-bansos%20>
- Dosen UMM Tekankan Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi. 20 April 2024. <https://news.republika.co.id/berita/sc82ub330/dosen-umm-tekankan-pentingnya-pendidikan-antikorupsi>
- Bus Anti Korupsi KPK Mejang di Gedung Sate, Pj Gubernur Bey Ingatkan Bahaya Korupsi 8 Agustus 2024 <https://rejabar.republika.co.id/berita/shw3vh512/bus-anti-korupsi-kpk-mejang-di-gedung-sate-pj-gubernur-bey-ingatkan-bahaya-korupsi?>

Cara Umar bin Abdul Aziz Didik Anak Jadi Anti-Korupsi.16 Agustus 2024.  
<https://khazanah.republika.co.id/berita/siajyv451/cara-umar-bin-abdul-aziz-didik-anak-jadi-antikorupsi-part2>